

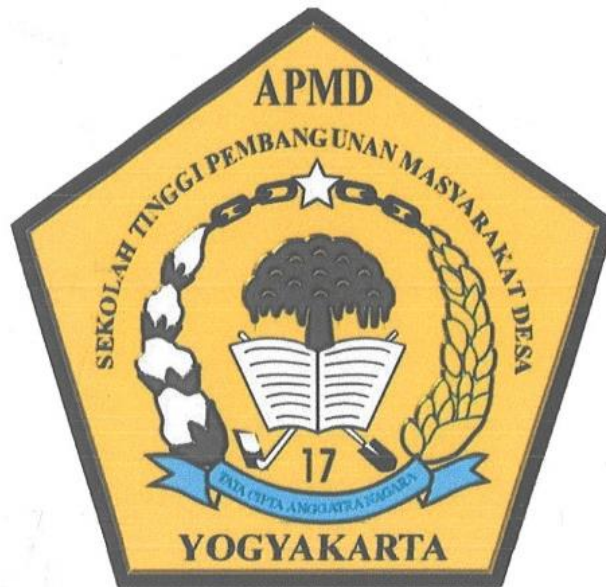
**SKRIPSI**

**PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGKAN USAHA**

**MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

(Studi Di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul

Daerah Istimewa Yogyakarta)



**OLEH**

**JOHAN SATRIO DANGU PEWALI**

**19520135**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**



**HALAMAN JUDUL**

**PEMERINTAH KALUARHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

(Studi di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul  
Daerah Istimewa Yogyakarta)

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 November 2024  
Waktu : 08:30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

Penguji Samping I



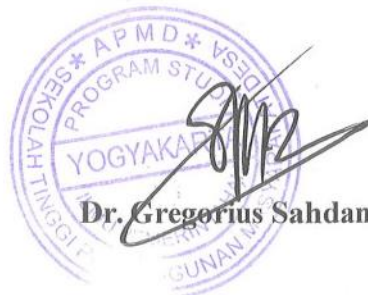
Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji Samping II



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johan Satrio Dangu Pewali

Nim 19520135

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban, guna menyelesaikan Jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini, telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata adanya ditemukan kesamaan dan kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta 11 April April 2025



Johan Satrio Dangu Pewali



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Johan Satrio Dangu Pewali

NIM : 19520135

Telp : 081238853490

Email : [ipewali@gmail.com](mailto:ipewali@gmail.com)

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat  
Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 11 April 2025



Johan Satrio Dangu Pewali  
19520135

## **MOTTO**

“Berani Melangkah Adalah Langkah Awal Menuju Kesuksesan”

“Jangan Meliah Ke Masa Depan Dengan Mata Buta, Masa Yang Lampau Sangat Berguna Sebagai Kaca Benggala Daripada Masa Yang Akan Datang”

**(Ir. Soekarno)**

“Pengharapan Paling Tinggi Bagi Seorang Pkrja Keras Bukanalah Apa Yang Ia Peroleh Dari Pekerjaan Itu, Tetapi Seberapa Berkembangnya Ia Dari Kerja Kerasnya Itu”

**(Jhon Ruskin)**

“I Believe I Can (Saya Percaya Saya Bisa)”

**(Johan Satrio Dangu Pewali)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Banyak orang yang telah menawarkan dukungan, dorongan, dan doa selama proses penulisan skripsi ini.

Dengan rasa terima kasih, penulis menyampaikan karya ini kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan perintah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua serta saudara dan saudari saya, Bapak Bernardus Sudi Pewali, Ibu Yohana Rade Willu, dan segenap keluarga besar atas kasih sayang, doa, dan dorongan terus menerus yang diberikan kepada saya sepanjang waktu, terutama selama proses menyelesaikan skripsi.
3. Kepada Adik-adik saya Flora Pewaly, Ketlin Pewali, Nolan Pewali, Wely Pewali, Rido Pewali, Yane Ngera, dan semua sanak keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya
4. Kakak saya, Nell Bongu, Umbu Lakeda, Apeles Lalo, Iwan Gela, Rano Ngaru, Dewa Atiwiki yang selalu mendukung dan memberikan motivasi
5. Bapak Dr. Jaka Triwidaryanta., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam Mengembangkan UMKM” dengan baik. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua STPMD “APMD” di Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
6. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pemerintah Desa dan Masyarakat Kalurahan Karangawen yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

Yogyakarta, 11 April 2025

Penulis

Johan Satrio Dangu Pewali



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAC.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Literatur Review.....	7
G. Kerangka Konseptual .....	8
1. Pemerintah Desa .....	9
2. Pengembangan UMKM.....	11
H. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian .....	20
2. Lokasi, Objek dan Subjek Penelitian.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisa Data .....	24
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN USAHA MIKRO KECIL DAN	
MENENGAH DI KALURAHAN KARANGAWEN.....	
A. Profil Kalurahan Karangawen .....	26
B. Profil UMKM Kalurahan Karangawen .....	40
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO	
KECIL DAN MENENGAH.....	
A. Penguatan Anggaran Oleh Pemerintah Kalurahan .....	49
B. Penguatan Pengetahuan dan Keterampilan Oleh Pemerintah Kalurahan ....	53
C. Pemberian Akses Pembayaran Oleh Pemerintah Kaluraha .....	58
D. Pelatihan UMKM .....	62
E. Penguatan Fasilitas dan Infrastruktur .....	67
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	78
PEDOMAN WAWANCARA .....	80
LAMPIRAN .....	82

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1.1. Tabel Data Informan Penelitian .....	21
Tabel. 2.1. Tabel Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	30
Tabel. 2.2. Tabel Penduduk Berdasarkan Agama .....	30
Tabel. 2.3. Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	31
Tabel. 2.4 Tabel Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	32
Tabel. 2.5. Tabel Pengurus UMKM Kalurahan Karangawen .....	43
Tabel. 2.6. Tabel Program Kerja UMKM Kalurahan Karangawen .....	44
Tabel. 2.7. Tabel PelakuUMKM Kalurahan Karangawen .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar. 2.1. Gambar Peta Wilayah Kalurahan Karangawen.....	29
Gambar. 2.2. Gambar Bagan Pemerintahan Kalurahan Karangawen.....	37

## ABSTRAC

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok. Kalurahan Karangawen adalah salah satu Kalurahan di Yogyakarta yang mendapatkan predikat sebagai desa wisata yang memadukan potensi wisata yang meliputi wisata alam buatan dan budaya yang ditunjang dengan keberagaman sentra industri UMKM. Bukan hanya itu, Kalurahan Karangawen juga termasuk dalam kategori Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang memiliki pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. subjek dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan Karangawen yakni Lurah Kalurahan Karangawen, Tata Laksana Kalurahan Karangawen, Kamituwo Kalurahan Karangawen serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kalurahan Karangawen yakni pada sektor Makanan, Sektor Kerajinan Tangan, Sektor Pertanian dan Sektor Toko Ritel di Kalurahan Karangawen. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa: Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Karangawen telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen berupa Penguatan Anggaran, Penguatan Pengetahuan, Pemberian Akses Pembiayaan, Pelatihan, serta Penguatan Fasilitas dan Infrastruktur dalam menunjang pengembangan UMKM.

Namin Pemerintah Kalurahan Karangawen masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi peran Pemerintah Kalurahan. Meskipun sudah ada kebijakan dan program untuk mendukung UMKM, masalah seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta terbatasnya fasilitas dan infrastruktur menjadi penghambat utama. Program pelatihan dan pemberian akses pembiayaan sering kali belum merata dan kurang menyentuh seluruh pelaku UMKM. Koordinasi yang kurang antara Pemerintah Kalurahan Karangawen dan pelaku UMKM juga sangat mempengaruhi pengembangan UMKM di kalurahan karangawen. Maka dari itu, Pemerintah Kalurahan Karangawen diharapkan dapat meningkatkan berbagai fasilitas pendukung dan penunjang pengembangan UMKM di Kalurahan Karangawen agar UMKM di Kalurahan Karangawen dapat berkembang dengan baik. sehingga dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, mendorong ekonomi lokal yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengembangan, UMKM.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu atau kelompok. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, tumbuhnya ekonomi, tenaga kerja, dan distribusi hasil pembangunan. Perbincangan seputar isu yang melibatkan sektor UMKM di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Beberapa isu sentral yang kerap menjadi fokus perdebatan di antara stakeholders mencakup regulasi, ketersediaan akses keuangan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa permasalahan yang ada seperti regulasi yang rumit dan tidak konsisten, akses terbatas ke pembiayaan, keterbatasan inovasi dan teknologi, pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang, dan tantangan lingkungan yang berkelanjutan (Nur Sudati Sarfia, Eka Hanung Atmaja, 2019). Untuk mengatasi permasalahan UMKM di Indonesia, langkah-langkah strategis dapat diambil. Pertama, diperlukan upaya perombakan regulasi yang lebih efektif dan bersahabat bagi UMKM. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pengurangan birokrasi yang berlebihan, dan pemberian pedoman yang jelas untuk memastikan kejelasan aturan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi (Anggraeni et al., 2021).

Selain itu, pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dapat ditingkatkan untuk menyediakan solusi keuangan yang inovatif dan mudah diakses. Program pelatihan dan pendampingan finansial juga perlu diperkuat untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan UMKM di Indonesia (Putra, 2016).

Pengembangan UMKM seharusnya dimulai dari tingkat paling mendasar yaitu Desa. Desa merupakan lapisan terkecil dalam struktur ekonomi, dan meningkatkan potensi UMKM di tingkat ini dapat menciptakan dampak positif yang luas. Dengan memfokuskan upaya pada pengembangan UMKM desa, dapat terjadi peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan redistribusi peluang ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mendorong inisiatif yang mendukung pelatihan, akses keuangan, dan pemasaran untuk UMKM desa, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh negeri. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Pemerintah desa seringkali menghadapi keterbatasan anggaran yang membatasi kapasitas mereka untuk memberikan dukungan yang cukup besar kepada UMKM. Ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program



pelatihan, akses keuangan, dan fasilitas infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas UMKM.

2. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

UMKM di tingkat desa mungkin mengalami kendala pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis mereka. Program pemberdayaan perlu fokus pada pendidikan, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha lokal dalam mengelola usaha mereka secara efisien dan berkelanjutan.

3. Kurangnya Akses Pembiayaan

Salah satu hambatan utama bagi UMKM adalah kurangnya akses ke pembiayaan. Pemerintah desa perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan setempat untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi UMKM.

4. Tingkat kesadaran yang rendah

Beberapa pengusaha UMKM mungkin kurang menyadari potensi pemberdayaan yang ditawarkan oleh program pemerintah desa. Oleh karena itu, kampanye penyuluhan dan promosi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengusaha UMKM dalam program pemberdayaan.

5. Kurangnya Infrastruktur pendukung

Infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan, listrik, dan teknologi informasi, dapat menjadi kendala bagi UMKM di desa. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa infrastruktur dasar ini

ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM.

#### 6. Pengelolaan Program yang tidak efektif

Kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif dari program pemberdayaan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakmampuan mencapai hasil yang diinginkan. Penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik untuk memastikan program pemberdayaan berjalan efisien dan efektif.

Desa Karangawen merupakan salah satu kalurahan yang terletak di Kapaneon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Karangawen mendapatkan predikat sebagai Desa wisata yang memadukan potensi wisata yang meliputi wisata alam buatan, dan budaya yang ditunjang dengan keberagaman sentra industri UMKM termasuk kuliner. Selain itu, Kalurahan Karangawen Gunungkidul termasuk dalam kategori Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang memiliki pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi yang sangat cepat. Hal ini dipengaruhi perkembangan UMKM di Kalurahan Karangawen juga sangat cepat dan optimal. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Kalurahan Karangawen diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan strategi pemerintah Kalurahan Karangawen.

Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Kalurahan sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan. Strategi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Karangawen adalah memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses keuangan, dan pengembangan

infrastruktur. Masyarakat dapat membeli produk-produk UMKM lokal untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dapat memfasilitasi akses pasar dan promosi produk UMKM di Kalurahan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan UMKM di Kalurahan. Pemerintah Kalurahan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Kalurahan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan memperkuat manajemen usaha. Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Dengan partisipasi aktif dari pemerintah Kalurahan dan masyarakat, pengembangan UMKM di Kalurahan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan penduduk Kalurahan. Tentunya pengembangan UMKM harus terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Melihat hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemerintah Kalurahan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mengembangkan UMKM?

### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan arah dari sebuah penelitian. Fokus penelitian juga merupakan bagian dari strategi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan juga bisa dijadikan sebagai pedoman dalam mengumpulkan informasi. Maka dari itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penguatan Anggaran oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
2. Penguatan pengetahuan dan ketrampilan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
3. Pemberian akses pembiayaan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
4. Pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
5. Penguatan fasilitas dan infrastruktur Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dukungan anggaran yang diberikan Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
2. Untuk menggambarkan pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
3. Untuk menggambarkan akses pembiayaan UMKM Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM

4. Untuk menggambarkan pelatihan yang diberikan Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM
5. Untuk menggambarkan infrastruktur pendukung yang diberikan Pemerintah Kalurahan Karangawen kepada UMKM

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya anggaran yang bisa digunakan untuk mengembangkan UMKM
2. Adanya adanya pelatihan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM di Kalurahan Karangawen

#### **F. Literatur Review**

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Haliwangka, Razak, & Sjarlis (2023), diketahui bahwa Pemerintah Kelurahan memiliki peranan yang sangat penting pada pengembangan UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Nuriukman (2023), diketahui bahwa peran Pemerintah dalam pengembangan UMKM bekerja sangat efektif baik sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UMKM adalah memberikan dukungan dan dorongan berupa sarana dan prasarana, mendukung kebijakan UMKM, dan memberikan apresiasi kepada UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana, Muhhamdiah, & Hasanuddin tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam pengembangan UMKM, Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Tindakan yang dilakukan Pemerintah sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan UMKM. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati & Hendratmoko (2021) yang menjelaskan bahwa Pemerintah sudah melakukan upaya pengembangan UMKM yang dibagi dalam tiga peran yaitu penumbuhan iklim, penguatan potensi usaha, dan melindungi usaha masyarakat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM meliputi pengandaan permodalan, inovasi hasil produksi, perluasan jaringan pemasaran, dan pengandaan sarana prasarana produksi yang memadai (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2020). Secara umum, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada objek penelitian yaitu UMKM. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya hanya mengkaji tugas pemerintah desa tetapi dalam penelitian ini membahas strategi yang digunakan untuk mengembangkan UMKM yang ada.

#### **G. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini pembahasan tentang peran Pemerintah Kelurahan dalam pengembangan UMKM yang dipandu oleh salah satu perspektif dari Mazhab Timoho yakni perspektif *Governing* Atau disebut perbuatan pemerintah. Perspektif *Governing* atau perbuatan pemerintah ini mengkaji beberapa hal yakni meliputi mengkaji aktifitas pemerintah teknologi pemerintah, peraturan perundang-undangan serta kebijakan dari

pemerintah maka dari itu perspektif *Governing* melekat pada pemerintah dan pemerintah mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Perspektif *Governing* dimaknai sebagai suatu usaha atau upaya untuk mengatur dan mengurus yang harus meliputi tahap proses, fungsi dan hasil. Dalam perspektif *Governing* pembentukan hukum dan kebijakan merupakan perbuatan pemerintah yang penting maka dari itu perspektif *Governing* pula memuat proses politik, hukum dan administrasi.

### **1. Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa, yang mungkin disebut dengan istilah lain, dan dibantu oleh Perangkat Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Kepala Desa memiliki sejumlah wewenang, yaitu: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; 3) Mengelola keuangan dan aset Desa; 4) Menetapkan Peraturan Desa; 5) Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 6) Mendorong kehidupan masyarakat desa; 7) Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 8) Meningkatkan perekonomian desa dan mengintegrasikannya untuk mencapai kemakmuran masyarakat; 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat; 10) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat; 11) Memanfaatkan teknologi yang tepat guna; 12) Mengkoordinasikan



pembangunan desa secara partisipatif; 13) Mewakili desa di pengadilan atau memberikan kuasa hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan; dan 14) Melaksanakan wewenang lain yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai aktor dan institusi yang memiliki wewenang serta hak untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tindakan mengatur dan mengelola memiliki beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan melaksanakan peraturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat semua pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menangani masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan melaksanakan alokasi sumber daya (seperti dana, peralatan, dan personel) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagikan sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti melaksanakan, menjalankan, dan merawat pelayanan publik yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa memiliki tiga fungsi utama: pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pengaturan mencakup pembuatan peraturan mengenai pemanfaatan barang-barang publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya alam. Sementara itu, pemberdayaan

bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat (Eko et al., 2014).

## **2. Pengembangan UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sumber lapangan kerja utama, UMKM juga berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan penyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). UMKM telah menyumbang sekitar 60-70% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi sektor yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Menurut data, Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan sektor ini berpengaruh besar terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Meskipun demikian, untuk memastikan sektor UMKM dapat berkembang lebih optimal, dibutuhkan pendekatan yang holistik, dukungan kebijakan yang berkelanjutan, serta inovasi dan transformasi dari pelaku UMKM itu sendiri. (Mahalizikri, 2019)

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting karena UMKM berperan sebagai salah satu pilar utama perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini. UMKM memberikan peluang usaha bagi masyarakat, memungkinkan mereka untuk

beraktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk sangat besar. Dengan kata lain, UMKM dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan dan pengangguran. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang menjelaskan secara rinci definisi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi UMKM yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi produktif yang tidak terkait dengan perusahaan besar atau menengah lainnya. UMKM dijalankan oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk kategori UMKM

Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kunci penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara, terutama di tingkat lokal dan desa. UMKM memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta mendorong pemerataan ekonomi. Untuk itu, pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah desa. (Widayanti et al., 2017)

Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) oleh pemerintah desa merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.

**a. Pemberian Anggaran, Akses modal dan Pembiayaan**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah terbatasnya akses terhadap modal usaha. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro atau bank, serta menyediakan program bantuan dana atau pinjaman dengan bunga rendah untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menginisiasi program tabungan dan investasi bersama untuk mendukung keberlanjutan usaha kecil ini

Namun, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala utama dalam pengembangan usahanya, yakni keterbatasannya akses terhadap anggaran atau pembiayaan yang dibutuhkan untuk memperbesar skala usaha UMKM. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial untuk memperkuat anggaran dan memastikan bahwa UMKM mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk membuka akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat menawarkan pinjaman dengan bunga rendah, serta memberikan fasilitas kredit mikro yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha kecil. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat diberdayakan dengan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik agar mereka dapat mengelola dana dengan bijak dan meningkatkan profitabilitas usaha.

Banyak UMKM kesulitan mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan karena tidak memiliki jaminan yang cukup atau rekam jejak yang bagus dalam hal pengelolaan keuangan. Untuk itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendirikan lembaga atau program yang bisa menjamin pinjaman UMKM, seperti program jaminan kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) atau Bank Indonesia. Ini akan memberikan rasa aman bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Pemerintah melalui anggaran negara, anggaran daerah maupun anggaran desa dapat menyediakan dana untuk berbagai program pemberdayaan UMKM. Maka dari itu, Pemerintah Desa memiliki peran utama dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM. Melalui berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terjerat bunga yang tinggi. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan non-bank untuk menciptakan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM, yang umumnya belum memiliki agunan atau *track record* yang kuat.

**b. Penguatan Fasilitas dan Peningkatan Infrastruktur**

Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan UMKM. Infrastruktur bukan hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas yang dapat menunjang produktivitas, distribusi, dan pemasaran produk UMKM. Tanpa infrastruktur yang memadai, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka, karena terbatasnya akses terhadap pasar, sumber daya, dan teknologi.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya juga merupakan salah satu kontribusi penting pemerintah desa untuk mendukung perkembangan UMKM. Dengan infrastruktur yang lebih baik, distribusi produk UMKM dapat lebih lancar, biaya produksi dapat ditekan, dan akses ke pasar yang lebih luas akan terbuka. Selain itu, sistem logistik yang efisien juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional usaha. Pemerintah bisa berperan aktif dalam memperbaiki infrastruktur di daerah yang memiliki potensi UMKM, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau pasar dan bahan baku.

Peran pemerintah desa dalam memfasilitasi UMKM untuk mengakses pasar global, baik melalui promosi produk lokal maupun bantuan partisipasi dalam pameran dan expo internasional. Program-program ini bertujuan untuk



meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mereka dapat bersaing dengan produk-produk dari usaha yang lebih besar.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemberian infrastruktur yang memadai oleh pemerintah desa merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM. Infrastruktur yang baik dapat mengatasi banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti keterbatasan akses pasar, biaya produksi yang tinggi, dan kurangnya pemahaman teknologi. Dengan adanya infrastruktur yang tepat, UMKM dapat berkembang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kompetitif. Pemerintah desa, sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki peran sentral dalam mewujudkan ini, melalui kebijakan, program, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di desa dapat menjadi pendorong utama perekonomian daerah dan nasional.

**c. Penguatann Pengetahuan, Ketrampilan dan Kesadarann melalui Pelatihan dan Pendidikan**

Salah satu langkah pertama yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pendidikan kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dasar kepada pelaku UMKM mengenai cara mengelola usaha secara profesional, mulai dari perencanaan usaha, manajemen keuangan,

pemasaran, hingga pengembangan produk. Selain itu, pelatihan tentang penggunaan teknologi juga sangat penting agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan sehingga terjadi perubahan melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan mengembangkan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan untuk para pelaku UMKM di desa, guna meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial mereka. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, pemasaran digital, teknik produksi, hingga pengembangan produk. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional usaha mereka.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya, dapat mengadakan pelatihan rutin di berbagai daerah untuk menjangkau pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan bekal pengetahuan

yang lebih luas, pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan berdaya saing tinggi. Selain pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis juga sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah dapat memfasilitasi program pendampingan yang menghubungkan pelaku UMKM dengan mentor atau konsultan yang berpengalaman dalam bidang tertentu, seperti pemasaran, inovasi produk, atau pengelolaan bisnis. Pendampingan ini tidak hanya membantu UMKM untuk mengatasi masalah teknis, tetapi juga memberikan arahan yang jelas dalam menjalankan bisnis mereka. Program pendampingan yang efektif juga dapat membantu UMKM untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan usaha mereka, serta merumuskan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan adanya bimbingan yang berkelanjutan, UMKM dapat berkembang secara lebih terstruktur dan dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih tepat dalam mengembangkan usaha.

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau menganalisa data dengan menggunakan alat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa pernyataan dan gambar bukan angka (Sugiyono, 2017). Penelitian akan memuat kutipan-

kutipan data untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terkait permasalahan yang terjadi di Kalurahan Karangawen. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan dokumentasi resmi. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu studi kasus tentang strategi Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mengembangkan UMKM. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji tipe tertentu tetapi menggambarkan fenomena yang sedang terjadi.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah yang terjadi. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna.

## **2. Lokasi, Objek dan Subjek Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

### **b. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Karangawen Dalam Pengembangan UMKM

c. **Subjek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah informan karena lebih spesifik. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar lokasi penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel Informan Penelitian**

*Tabel. 1.1. Tabel Informan Penelitian*

No	Nam Informan	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	keterangan
1	Erman Susilo	L	Sarjana	Lurah Kalurahan Karangawen
2	Yohanes, D. W. Saputra	L	SMA	Tata Laksana Kalurahan Karangawen
3	Arif Manuji	L	Sarjana	Kmitua Kalurahan Karangawen
4	Pardi	L	SMP	Pelaku UMKM Bidang Kerajinan Tangan
5	Arina Wati	P	SMA	Pelaku UMKM Sektor Makanan
6	Sumaryanti	P	SMA	Pelaku UMKM Toko Ritel
7	Gambul		SMA	Pelaku UMKM Bidang Pertanian

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat dianalisis bahwa sampel terdiri dari tujuh individu dengan komposisi lima laki-laki dan dua perempuan, menunjukkan dominasi gender laki-laki. Tingkat pendidikan para informan bervariasi, dengan mayoritas (lima orang) memiliki latar belakang pendidikan SMA, sementara dua orang lainnya memiliki gelar sarjana (S-1). Profesi dan jabatan para informan mencerminkan keragaman peran dalam masyarakat, termasuk pejabat pemerintahan seperti Lurah dan Kamituwo, pelaku UMKM, ketua organisasi masyarakat (LKM), serta masyarakat umum. Keragaman ini menunjukkan upaya untuk mendapatkan perspektif dari berbagai sudut pandang dalam komunitas. Menariknya, individu dengan gelar sarjana cenderung menduduki posisi pemerintahan, seperti Lurah dan Kamituwo. Sementara itu, peran-peran lain seperti pelaku UMKM, ketua LKM, dan perwakilan masyarakat umum diisi oleh individu dengan latar belakang pendidikan SMA. Hal ini mungkin mencerminkan struktur sosial dan persyaratan pendidikan untuk posisi-posisi tertentu dalam masyarakat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di maksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Obsevasi**

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengamati sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Proses mengamati meliputi beberapa hal yaitu mencatat, mendokumentasikan dan mengajukan beberapa pertanyaan yang mencakup penelitian (Creawell & Jhon, 2016). Pada penelitian ini, peneliti mengobservasi strategi pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM yang ada di Karangawen.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data langsung dari sasaran penelitian. Wawancara diperlukan untuk mendukung hasil pengamatan dilapangan, selain itu juga guna menghasilkan penelitian yang objektif. Objektif dalam artian tidak hanya merupakan subjektivitas peneliti ataupun dari narasumber yang tidak puas dengan objek yang di teliti (Creawell & Jhon, 2016). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 7 informan untuk mendapatkan informasi tentang strategi Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mengembangkan UMKM yang ada.



### c. Dokumentasi

Dokumentasi sangat diperlukan pada saat penelitian agar kita memiliki bukti yang jelas. Dokumentasi bentuk file dan foto sehingga dokumentasi tersebut sebagai perbandingan antara data dan dokumen yang ada dalam penelitian ini, mengambil gambar pada saat pengambilan data sekaligus merekam proses pengambilan data (Sugiyono, 2017). Dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa file Profil Kelurahan Karangawen tahun 2024 dan foto dengan informan penelitian.

## 4. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif menurut Moleong (2007:288). Data yang diperoleh dalam bentuk ucapan dan tulisan akan diolah dengan cara mengungkapkannya dalam kata-kata atau kalimat, serta mengklasifikasikan seluruh data dan menghubungkan aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, dalam proses analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing atau verification*).

### a. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses untuk memilah data yang penting dan yang tidak penting, serta

mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola hubungan antar kategori, dan menarik kesimpulan, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti maupun pihak lain.

**b. Reduksi Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan, kemudian dianalisis, dideskripsikan, dan direfleksikan (Sugiyono, 2016: 309)

**c. Penyajian Data**

Penyajian data adalah hasil dari proses reduksi yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya, dan membentuk suatu kesatuan yang utuh (Sugiyono, 2018: 249).

**d. Penarikan Kesimpulan**

Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai jenis data dan sumber yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN KARANGAWEN**

#### **A. Profil Kalurahan Karangawen**

Sejarah Kalurahan Karangawen dapat dikaitkan dengan sejarah Kabupaten Gunung Kidul dan wilayah sekitarnya. Kabupaten Gunung Kidul sendiri memiliki sejarah yang kaya, dengan jejak budaya dan kehidupan masyarakat yang berkembang sejak zaman dahulu. Desa Karangawen diperkirakan telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, desa ini menjadi bagian dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Selama periode tersebut, desa ini mungkin merupakan daerah pertanian yang dihuni oleh masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil bumi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, desa Karangawen menjadi bagian dari administrasi pemerintahan setempat yang baru terbentuk. Seiring berjalannya waktu, desa ini mengalami perkembangan dan perubahan yang mencerminkan perkembangan Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan.

Kalurahan Karangawen merupakan salah satu Kalurahan dari 144 Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kalurahan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Kapanewon Girisubo. Kapanewon Girisubo terdiri dari 8 Kalurahan. Kalurahan Karangawen terletak di barat pemerintahan kapanewon Girisubo. Kalurahan Karangawen mempunyai luas sebesar 6.252.573 Ha dan dibagi menjadi beberapa padukahan yaitu Kepuh, Bandung, Tlasih, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen dan Ngaglik. Jumlah penduduk di Kalurahan Karangawen 1.633 jiwa dengan rincian

penduduk 800 jiwa laki-laki dan 833 perempuan. Kalurahan Karangwen merupakan Kalurahan dengan luas wilayah relatif kecil di bandingkan dengan wilayah Kalurahan lain di Kapanewon Girisubo.

**a. Kondisi Geografis**

Kalurahan Karangawen merupakan salah satu dari 144 kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, dan merupakan bagian dari pemerintahan Kapanewon Girisubo, yang terdiri dari 8 kalurahan. Kalurahan Karangawen terletak di bagian barat Kapanewon Girisubo. Secara geografis, Kalurahan Karangawen terletak pada koordinat  $8^{\circ}8'$  LS -  $8^{\circ}09'$  LS dan  $110^{\circ}43'$  BT -  $110^{\circ}45'$  BT. Wilayah Kalurahan ini memiliki luas sekitar 625,2573 hektar, yang terbagi menjadi beberapa padukuhan, yaitu Kepuh, Bandung, Tlasi, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen, dan Ngaglik.

Berdasarkan kondisi topografi, Kalurahan Karangawen berada di Zona Selatan Kabupaten Gunungkidul, yang dalam RPJMD Kabupaten disebut sebagai wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon Gebergton atau Zuider Gebergton), dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Batuan dasar di wilayah ini terdiri dari batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Lahan di Kalurahan Karangawen memiliki tingkat kemiringan yang bervariasi.

Curah hujan rata-rata di daerah ini adalah 1954,43 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 89 hari. Musim hujan berlangsung antara bulan Oktober hingga Maret-April, dengan puncak

curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Sedangkan bulan kering berkisar antara 7 hingga 8 bulan. Suhu udara rata-rata harian adalah 27,7°C, dengan suhu minimum 18,2°C dan suhu maksimum 33,4°C. Potensi alam di Kalurahan Karangawen sangat mendukung untuk berbagai usaha, seperti tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, srikoyo, sirsat, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga), perikanan tangkap, serta usaha budidaya ternak (penggemukan).

Secara Administratif Kalurahan Karangawen mempunyai batas wilayah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo dan Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo

Sedangkan orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) seperti yang sudah tercantum dalam data monografi Kalurahan Karangawen menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 5,5 Km.
2. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota/Ibu Kota Kabupaten 41 Km.
3. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi 71 Km.

**Gambar Peta Wilayah Kalurahan Karangawen**



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen

## **b. Kondisi Demografis**

### **1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kalurahan Karangawen, tercatat bahwa jumlah laki-laki sebanyak 800 orang dan perempuan 833 orang, sehingga total jumlah penduduk Karangawen mencapai 1.633 orang. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kalurahan Karangawen sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dengan

demikian, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Karangawen sebanyak 535 KK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 2. 2. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-laki	800	48,98
2	Perempuan	833	51,01
TOTAL		1.633	100%

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen*

Berdasarkan tabel di atas, rincian jumlah penduduk di Kalurahan Karangawen menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak, yakni sebanyak 833 orang, sedangkan jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 800 orang. Selisih antara keduanya tidak terlalu besar.

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

**Tabel 2. 2. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	1.182	72,38
2	Kristen	443	27,12
3	Katolik	8	0,48
4	Hindu	0	0
5	Budha	0	0
TOTAL		1.633	100%

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen*

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Kalurahan Karangawen menganut agama Islam, dengan jumlah sebanyak

2.067 orang. Selain itu, terdapat penganut agama Kristen yang berjumlah 443 orang dan agama Katolik dengan jumlah 8 orang. Sementara itu, tidak ada penganut agama Hindu maupun Buddha di wilayah ini. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kalurahan Karangawen hanya memeluk tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

***Tabel 2.3. Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian***

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ibu Rumah Tangga	123	7,53
2	Pelajar/Mhasiswa	135	8,26
3	Pensiunan	5	0,30
4	Belum Bekerja	236	14,45
5	ASN	21	1,28
6	Buruh/Tukang	37	2,26
7	Karyawan BUMN/BUMD	3	0,18
8	Karyawan Swasta	152	9,30
9	Wira Swasta	92	5,63
10	Tenaga Medis	3	0,18
11	Petani, Peternak dan Nelayan	803	49,17
12	Pekerjaan Lainnya	23	1,40
TOTAL		1.633	100 %

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Kalurahan Karangawen memiliki berbagai macam profesi.



Namun, pekerjaan sebagai petani, peternak, atau nelayan merupakan profesi terbanyak di kalurahan ini, dengan jumlah mencapai 803 orang. Oleh karena itu, secara umum, mayoritas masyarakat di Kalurahan Karangawen bekerja sebagai petani, peternak, atau nelayan.

#### 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

***Tabel 2.4. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan***

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	312	19,10
2	Belum Tamat SD/MI	130	7,96
3	Tamat SD/MI	549	33,61
4	SMP/MTS	316	19,35
5	SMA/SMK/MA	254	15,55
6	DI/II	9	0,55
7	Akademi/DIII/S.Muda	9	0,55
8	DIV/S1	54	3,30
TOTAL		1.633	100%

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawen*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan di Kalurahan Karangawen adalah tamat SD/MI, dengan jumlah penduduk mencapai 549 orang. Selanjutnya, tingkat pendidikan SMP/MTS diikuti oleh 316 orang penduduk. Dengan demikian, mayoritas masyarakat di Kalurahan Karangawen memiliki tingkat pendidikan tamat SD/MI. Kondisi ini tentu berpengaruh pada pengalaman, wawasan, dan tingkat pendidikan masyarakat, yang

juga berdampak pada jenis pekerjaan mereka, di mana mayoritas bekerja sebagai petani, peternak, atau nelayan.

**c. Sarana dan Prasarana**

Kalurahan Karangawen memiliki potensi yang serupa dengan kalurahan lainnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai infrastruktur untuk mendukung berbagai kegiatan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pengembangan sentra produksi. Secara umum, Kalurahan Karangawen telah memiliki pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi hal-hal berikut:

1. Prasarana jalan di Kalurahan Karangawen memiliki panjang total 15,54 km, yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 2,94 km dan jalan Kalurahan sepanjang 13,60 km. Kalurahan Karangawen juga dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer, yang merupakan bagian dari Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dengan panjang yang direncanakan mencapai 2,9 km.
2. Sarana air bersih di Kalurahan Karangawen sebagian besar berasal dari sumber air permukaan, seperti telaga dan bak penampungan air hujan, serta disuplai menggunakan tangki. Untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih di wilayah ini masih belum tersedia
3. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Kalurahan, beberapa langkah telah dilakukan, di antaranya: pengembangan Penampungan Air Hujan (PAH), pengaktifan Sambungan

Rumah (SR) dari PDAM, dan penyaluran air melalui sistem dropping. Dropping air ini dilakukan dalam kondisi darurat, biasanya antara bulan Juni hingga Desember, dengan sumber bantuan dari pemerintah, swasta, serta secara swadaya.

4. Prasarana pemerintahan di Kalurahan Karangawen sudah tersedia, termasuk kantor kalurahan yang berfungsi dengan baik. Di Kalurahan Karangawen, kantor desa dan balai desa berada dalam satu gedung yang sama, yang juga merupakan kompleks kantor desa. Dari segi efektivitas, hal ini cukup baik karena seluruh kegiatan yang berkaitan dengan fungsi gedung dapat dipantau dan diawasi langsung oleh pihak pemerintah desa. Selain itu, terdapat pula 8 balai padukuhan yang mendukung kegiatan administratif dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Prasarana kesehatan di Kalurahan Karangawen mencakup sebuah Puskesmas (Pustu) dan beberapa unit Posyandu yang aktif, yang tersebar di berbagai padukuhan. Posyandu ini memiliki tugas untuk melayani balita, memberikan imunisasi, serta menyediakan makanan tambahan.
6. Prasarasarana pendidikan di Kalurahan Karangawen meliputi dua TK, satu PAUD, dan satu SD. Namun, Kalurahan Karangawen tidak memiliki SMP/SLTP maupun SMA/SLTA, sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang tersebut harus pergi ke luar kalurahan.

7. Prasarana keagamaan di Kalurahan Karangawen disediakan untuk mendukung kegiatan ibadah dan keagamaan. Mayoritas masyarakat di Kalurahan Karangawen menganut agama Islam, sehingga masjid dibangun di beberapa padukuhan. Selain itu, terdapat dua gereja yang terletak di Padukuhan Kepuh dan Padukuhan Tegalrejo.
8. Prasarana olahraga di Kalurahan Karangawen meliputi empat lapangan voli dan satu lapangan sepak bola.
9. Prasarana budaya di Kalurahan Karangawen berupa Resan, yang terletak di Padukuhan Bandung dan Padukuhan Karangawen. Resan adalah pohon yang digunakan untuk berdoa dengan cara membakar dupa kemenyan, yang dilakukan oleh juru kunci kalurahan.

#### **d. Pemerintah Kalurahan Karangawen**

##### **1. Visi**

Terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. Selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya tepat sasaran. Selalu meningkatkan profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkatnya. Menjadikan spiritual roh dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di

masyarakat. Mengembangkan sistem usaha mandiri melalui pemberdayaan BUMDes/BUMKal. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan inter golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di Kalurahan.

## **2. Misi**

Adapun Misi dari Pemerintah Kalurahan Karangawen adalah sebagai berikut:

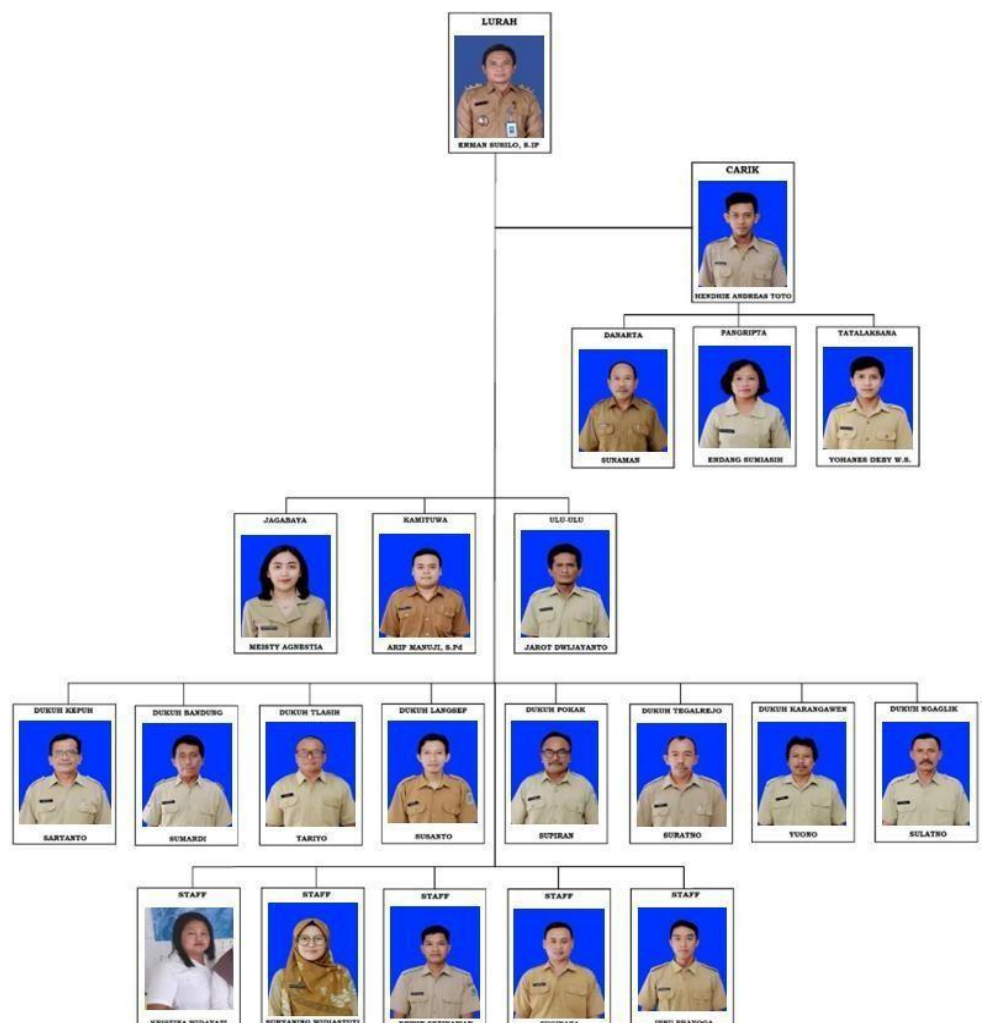
- 1) Mewujudkan pemerintahan yg transparan, jujur dan adil
- 2) Mengedepankan musyawarah mufakat baik dengan pemerintah kalurahan maupun masyarakat
- 3) Mengutamakan pelayanan publik yang cepat mudah dan tepat
- 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah kalurahan
- 5) Menanamkan nilai-nilai religius, budaya, kearifan lokal, melalui program pengembangan spiritual dan adat istiadat
- 6) Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program BUMKAL
- 7) Menggalang silaturahmi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di masyarakat.

## **3. Struktur Pemerintahan Kalurahan Karangawen**

Pemerintahan Kalurahan Karangawen dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh Carik serta lembaga-lembaga kalurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada

Panewu. Dukuh juga dibantu oleh Carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), bersama dengan lembaga-lembaga lainnya, dalam menjalankan pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan. Berikut adalah susunan struktur Pemerintahan Kalurahan Karangawen:

**Gambar Bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen**



Gambar di atas merupakan bagan Pemerintah Kalurahan Karangawen, yang menggambarkan tugas, fungsi, dan hubungan kerja antara semua elemen dalam Pemerintah Kalurahan. Dari struktur tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kalurahan Karangawen telah menyusun, memiliki, dan mengimplementasikan struktur organisasi kalurahan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Selain itu, menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Kesitimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan bahwa teknis dan pelaksana wilayah berfungsi sebagai unsur pembantu Lurah.

Berdasarkan aturan yang ada di Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, tugas pokok pada struktur pemerintahan Kalurahan Tepus terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait. Kepala Desa atau Lurah memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Carik atau Sekretaris Desa bertanggung jawab atas urusan administrasi, keuangan, dan perencanaan. Kepala Urusan (Kaur) membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi, dengan

Kaur Danarto menangani keuangan dan Kaur Prangipta mengelola tata usaha dan perencanaan. Kepala Seksi (Kasi) bertugas sebagai pelaksana teknis, meliputi Kasi Ulu-Ulu untuk kesejahteraan, Kasi Jagabaya untuk pemerintahan, dan Kasi Kamituwo untuk pelayanan masyarakat. Dukuh berperan sebagai perpanjangan tangan Kepala Desa di tingkat wilayah yang lebih kecil. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL) berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menampung dan menyalurkan aspirasi. Terakhir, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKMKal) berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Struktur ini dirancang untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan partisipatif di tingkat Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan Karangawen dipimpin oleh Lurah dan di bantu oleh Carik dan lembaga kalurahan. Dalam tugasnya seorang Lurah bertanggung jawab kepada Panewu. Dukuh dibantu oleh carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) beserta lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan. Berikut Susunan Struktur Pemerintah Kalurahan Karangawen



## **B. Profil UMKM Kalurahan Karangawen**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Karangawen Berdi pada Tanggal 20 Juli Tahun 2015. Berdirinya UMKM di Kalurahan Karangawen, Girisubo, Gunungkidul merupakan buah dari semangat masyarakat setempat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya lokal untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Girisubo, yang dikenal sebagai daerah pegunungan dengan kondisi geografis yang khas, memiliki banyak kekayaan alam seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

Pada awalnya, banyak warga Kalurahan Karangawen yang beralih ke sektor UMKM untuk mendukung kebutuhan hidup, mengingat wilayah ini memiliki tantangan dalam hal lapangan pekerjaan formal. Para pelaku usaha mikro di Karangawen mulai membuka usaha dengan modal kecil, sering kali mengandalkan keterampilan tradisional seperti membuat kerajinan tangan dari anyaman bambu, produksi pangan lokal seperti keripik, atau usaha berbasis pertanian lainnya. Produk-produk ini biasanya dipasarkan dalam skala lokal terlebih dahulu, sebelum akhirnya mulai dikenal di pasar yang lebih luas.

Keberhasilan UMKM di Kalurahan Karangawen tidak lepas dari peran pemerintah Kalurahan Karangawen, yang memberikan dukungan melalui pelatihan, pembinaan, serta akses pada fasilitas pendanaan. Program-program pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas produk,

keterampilan manajerial, serta kemampuan pemasaran digital, yang kini semakin penting di era modern. Selain itu, inisiatif dari pemerintah kalurahan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk UMKM, baik melalui event lokal, pameran, maupun jaringan pemasaran digital, semakin mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah ini.

UMKM di Kalurahan Karangawen juga turut memberikan dampak positif pada pemberdayaan masyarakat. Banyak warga, khususnya kaum ibu dan pemuda, yang mulai terlibat dalam usaha-usaha kecil ini, baik sebagai pelaku usaha maupun tenaga kerja. Ini tentu membantu mengurangi angka pengangguran dan membuka peluang ekonomi bagi keluarga-keluarga di Karangawen.

Dengan semangat gotong royong yang kuat, masyarakat Karangawen terus berupaya mengembangkan potensi UMKM mereka. Ke depan, Kalurahan Karangawen berharap dapat terus menciptakan iklim usaha yang lebih baik, mendukung inovasi, dan meningkatkan kualitas produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas. UMKM di Karangawen diharapkan menjadi pendorong utama bagi perekonomian daerah yang berkelanjutan, serta menjaga kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Girisubo.

Pada awalnya, usaha-usaha yang berkembang di Kalurahan Karangawen didorong oleh kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak dari warga yang memanfaatkan bahan baku lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan produk berbasis alam

lainnya. Para pengusaha mikro ini sering memulai usaha mereka dengan modal terbatas, namun dengan ketekunan dan dukungan dari komunitas, usaha-usaha tersebut mulai berkembang.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan UMKM di Kalurahan Karangawen tidak hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga membantu mempromosikan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Produk-produk seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan komoditas pertanian menjadi unggulan yang banyak dicari konsumen. Selain itu, UMKM di Kalurahan Karangawen juga berperan penting dalam memperkuat ekonomi lokal, karena mayoritas pengusaha UMKM mempekerjakan warga setempat, sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkelanjutan. Program pemerintah seperti pembiayaan mikro dan kemudahan akses pasar juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM di wilayah ini.

Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari berbagai pihak, UMKM di Kalurahan Karangawen kini menjadi pilar penting dalam perekonomian daerah. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya berwirausaha, dan UMKM di Karangawen diharapkan terus berkembang dan berinovasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.

## 1. Tabel Pengurus Organisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Struktur Organisasi UMKM Kalurahan Karangawen disajikan dalam table berikut:

Tabel Pengurus UMKM Kalurahan Karangawen

***Tabel.2.5. Tabel Pengurus UMKM Kalurahan Karangawen***

Ketua		:	Ibu Arin	Karangawen
Wakil Ketua		:	Ibu Yanti	Kepuh
Sekretaris I		:	Ibu Arni	Langsep
Sekretaris II		:	Ibu Erma	Ngaglik
Bendahara I		:	Ibu Wastini	Langsep
Bendahara II		:	Ibu Yuni Arianti	Bandung
Seksi Pemasaran I		:	Ibu Tri Winnurheini	Tlasi
Seksi Pemasaran II		:	Ibu Rini	Karangawen

*Sumber: Kalurahan Karangawen*

## 2. Jenis Usaha

Secara umum, masyarakat di Kalurahan Karangawen memiliki jenis usaha yaitu Makanan, Kerajinan Tangan, Toko Ritel, Pertanian. Kelebihan dari produk ini adalah beberapa produk sudah memiliki label. Sedangkan kelemahannya antara lain belum memiliki izin PIRT, hanya dititipkan di sekitar kalurahan atau kecamatan, kemasan menggunakan plastik biasa, pendapatan yang masih belum tetap, belum ada merek atau label, produk yang tidak laku sering dikembalikan, serta sistem titip ke warung hanya dilakukan jika ada pesanan.

### 3. Rancangan Program Kerja UMKM Karangawen

Berikut adalah Tabel Program Kerja UMKM Karangawen

***Tabel.2.6. Tabel Program Kerja UMKM Karangawen***

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		8	9	10	11	12	
1	Pertemuan rutin	V	V	V	V	V	Setiap Jumat Legi
2	Pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemasan</li> <li>• Pengolahan</li> <li>• pemasaran</li> </ul>						
3	Pameran		V				
4	Kemitraan	V					Konfirmasi Diskop
5	Advokasi				V	V	Koordinasi Dengan Pemkal
6	Studi Banding				V		
7	Legalisasi Produk				V		
8	Penyusunan Direktori Anggota	V					
9	Seminar/Lokakarya		V				

*Sumber: Profil Kalurahan Karangawe*

#### 4. Data Pelaku UMKM Kalurahan Karangawen

Berikut adalah Tabel Data Pelaku UMKM

*Tabel.2.7. Tabel Data Pelaku UMKM 1*

No	Nama	Alamat usaha				Bidang USAHA
		Dusun	Kalurahan	Kapanewon	Kabupaten	
1	Miyem	Kepuh	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Dagang
2	Rumiyem	Kepuh	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Dagang
3	Suyanti	Kepuh	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
4	Rita triati	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
5	Sumardi	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Batako
6	Sudayat	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Meubel
7	Sutini	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Lempeng
8	Tumijem	Bandung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kripik
9	Samikem	Andung	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
10	Tri	Tlasi	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
11	Yurita	Tlasi	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Catering
12	Supeni	Tlasi	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Camilan
13	Summaryamti	Tlasi	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
14	Pardi	Langsep	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Maubel
15	Parini	Langsep	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Gorengan
16	Artadi	Langsep	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Gorengan
17	Parni	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Catering
18	Widarno	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Anyaman
19	Sukawandi	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Bengkel
20	Rutinem	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Penjahit
21	Wakiran	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kayu
22	Suharti	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Gorengan
23	Tusianti	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kripik
24	Warinah	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
25	Wasitem	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe
26	Rina astuti	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Penjahit
27	Rubinem	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Tempe

28	Sugiyono	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kayu
29	Nartoreja	Pokak	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Anyaman
30	Sukeksi	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Peyek
31	Sumiyarsih	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kue kukus
32	Iva noviani	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Kue bronis
33	Sutarsa	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Meubel
34	Satikem	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Krupuk
35	Paelan	Tegalrejo	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Meubel
36	Isnuryati	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
37	Satiyem	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Aneka
38	Siswanto	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Catering
39	Sartini	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
40	Rini	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Warung
41	Arina wati	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Warung
42	Rukiyem	Karangawe	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
43	Yuliana	Ngaglik	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
44	Sugiyanti	Ngaglik	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Produksi
45	Sarpin	Ngaglik	Karangawen	Girisubo	Gunungkidul	Anyaman Bambu

Sumber: *Profil Kalurahan Karangawen 2024*

Tabel data di atas menunjukkan jumlah masyarakat di Kalurahan Karangawen yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Namun, dalam menjalankan usahanya, khususnya UMKM yang bergerak di bidang makanan, masyarakat menghadapi beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam mengembangkan usaha mereka. Salah satu kendala utama adalah tidak tersedianya wadah pemasaran untuk produk UMKM, yang menyebabkan tingkat produksi pelaku UMKM di bidang makanan bergantung pada adanya tempat untuk memasarkan produk mereka.

Meskipun Pemerintah Kalurahan Karangawen telah memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM, bentuk fasilitasi yang ada saat ini

belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Karangawen perlu mengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik guna mengatasi masalah tersebut. Dengan adanya fasilitasi dari Pemerintah Kalurahan Karangawen, diharapkan dapat mendukung perkembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan Karangawen.



### **BAB III**

## **PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

### **A. Penguatan Anggaran Oleh Pemerintah Kalurahan**

Penguatan anggaran oleh pemerintah kalurahan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM melalui penguatan anggaran di kalurahan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, pemerintah kalurahan memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya. Penguatan anggaran ini mencakup alokasi dana untuk berbagai program yang mendukung UMKM, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, pengembangan produk, serta pemasaran yang lebih luas. Dengan adanya anggaran yang cukup, kalurahan dapat merancang kebijakan dan program yang dapat membantu UMKM untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal.

Salah satu bentuk penguatan anggaran adalah melalui dana desa yang diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah kalurahan dapat mengalokasikan sebagian dana desa untuk memberikan bantuan modal usaha, baik berupa pinjaman tanpa bunga, hibah, ataupun bantuan peralatan

usaha bagi pelaku UMKM. Selain itu, anggaran juga dapat digunakan untuk program pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan agar pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efisien dan profesional.

Selain itu, penguatan anggaran juga dapat digunakan untuk menciptakan akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM. Pemerintah kabupaten bisa membangun kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dengan sektor swasta, lembaga keuangan, maupun pemerintah daerah dan pusat untuk memfasilitasi pemasaran produk UMKM. Dalam hal ini, pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi menjadi kunci, dengan memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran produk UMKM yang semakin relevan di era digital.

Penguatan anggaran ini juga harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur kabupaten dalam merancang dan mengelola program-program yang berfokus pada pengembangan UMKM. Aparatur kabupaten yang memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan kewirausahaan akan mampu memberikan pendampingan yang tepat kepada para pelaku UMKM.

Melalui penguatan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah kabupaten dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan. Dengan adanya program-program yang fokus pada pemberdayaan UMKM, pemerintah kabupaten berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan

mengurangi ketimpangan ekonomi di desa. Dengan demikian, penguatan anggaran untuk UMKM menjadi langkah strategis yang harus didorong agar desa dapat maju dan mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang sayalakukan ditemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Karangawen telah memberikan dukungan berupa Anggaran kepada pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Lurah Kalurahan Karanawen yakni Bapak Erman Susilo, S.IP sebagai berikut:

"Saat ini, anggaran untuk UMKM memang masih terbatas, dan sebagian besar dana yang ada dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan program sosial. Namun, kami sadar bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian kalurahan. Oleh karena itu, kami terus berupaya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada, serta mencari peluang pendanaan tambahan dari sumber lain, seperti pemerintah daerah, bank, atau lembaga pendanaan lain. Penguatan anggaran untuk UMKM menjadi salah satu prioritas kami ke depan. Kami juga tengah merencanakan program bantuan yang lebih besar, yang tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga pendampingan dalam hal pemasaran dan pengelolaan usaha." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Arina Wati selaku Pelaku UMKM Sektor Makanan hasil wawancaranya sebagai berikut:

"Selama ini, saya merasa bahwa anggaran yang diberikan Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mendukung UMKM masih sangat terbatas. Saya sudah mendengar tentang rencana penguatan anggaran untuk UMKM, tetapi sampai saat ini belum ada perubahan signifikan. Kami sangat berharap agar anggaran yang dialokasikan untuk UMKM bisa lebih besar, terutama untuk mendukung kegiatan produksi dan pemasaran. Misalnya, anggaran untuk pelatihan keterampilan, pembelian peralatan, dan pemasaran produk ke luar kalurahan. Jika anggaran ini bisa diperbesar, kami yakin banyak pelaku UMKM yang bisa berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Pernyataan terkait Anggaran Kembali di afirmasi oleh Bapak Pardi sebagai Pelaku UMKM Kerajinan Tangan mengatakan bahwa

"Saya melihat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk UMKM sangat terbatas dan sering kali hanya mencakup program-program kecil seperti pelatihan dasar atau bantuan infrastruktur. Namun, untuk penguatan usaha kami, kami membutuhkan lebih dari itu. Kami butuh anggaran yang lebih besar untuk mendukung pengembangan produk, memperluas pasar, serta mengakses teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk. Saya berharap Pemerintah Kalurahan Karangawen bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk UMKM dan memberikan prioritas pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar di kalurahan, seperti kerajinan tangan dan produk lokal." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama kemabli disampaikan oleh Bapak Gambul selaku pelaku UMKM Sektor Pertanian:

"Di sektor pertanian, kami masih merasa bahwa anggaran yang dialokasikan untuk UMKM tidak cukup untuk menjawab tantangan yang ada. Misalnya, kami membutuhkan dana untuk membeli alat pertanian yang lebih modern, serta untuk proses pengolahan hasil pertanian yang lebih efisien. Kalau anggarannya bisa diperbesar, kami bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian kami, serta memperbaiki sistem distribusi ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya penguatan anggaran dari Pemerintah Kalurahan Karangawen, kami yakin UMKM di sektor pertanian akan berkembang lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi kalurahan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Pernyataan yang sama kebalik diafirmasi oleh Ibu Sumartanti sebagai Pelaku UMKM Toko Ritel ia mengatakan bahwa

"Anggaran untuk UMKM yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen saat ini lebih bersifat bantuan kecil, seperti dana untuk kegiatan promosi atau pelatihan usaha. Namun, bagi kami yang mengelola toko ritel, dana yang lebih besar dan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama untuk mengembangkan usaha dan mengatasi kesulitan modal. Kami berharap agar Pemerintah Kalurahan Karangawen bisa meningkatkan anggaran untuk sektor UMKM, khususnya yang berkaitan dengan peralatan usaha, distribusi, dan pengembangan teknologi. Selain itu, anggaran tersebut juga perlu diperuntukkan untuk mendukung pemasaran produk lokal agar bisa lebih dikenal oleh konsumen di luar kalurahan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM mengharapkan adanya penguatan anggaran yang lebih besar dari Pemerintah Kaluraha Karangawen untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Meskipun Pemerintah Kaluraha

Karangawen sudah mengalokasikan dana untuk program-program kecil, banyak pelaku UMKM merasa bahwa anggaran yang ada masih sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka secara maksimal. Mereka berharap anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar, seperti pengembangan produk, pemasaran, teknologi, dan infrastruktur usaha. Selain itu, penguatan anggaran juga perlu diimbangi dengan peningkatan pendampingan dan pelatihan agar pelaku UMKM dapat mengelola dana tersebut dengan efektif. Ke depan, pengalokasian anggaran yang lebih besar dan lebih terarah akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM di kalurahan untuk berkembang.

#### **B. Penguatan Pengetahuan dan Keterampilan Oleh Pemerintah Kalurahan**

Penguatan pengetahuan dan keterampilan oleh pemerintah kalurahan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan langkah krusial dalam mendukung kemajuan ekonomi desa. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, namun tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, seperti keterbatasan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan inovasi produk, seringkali menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM melalui program pelatihan dan pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi.

Untuk mengoptimalkan potensi UMKM, pemerintah kalurahan perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk program-program

peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan usaha, seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pengelolaan SDM, serta strategi pemasaran. Melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM akan lebih terampil dalam mengelola usaha mereka, mengurangi risiko kegagalan, dan memperluas jangkauan pasar.

Selain itu, keterampilan dalam bidang teknologi dan digitalisasi juga sangat diperlukan. Pemerintah kalurahan dapat memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses bisnis UMKM, seperti pemanfaatan aplikasi akuntansi, e-commerce, dan media sosial untuk pemasaran. Pelatihan berbasis teknologi ini akan membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun global, melalui platform digital yang semakin berkembang.

Penting juga bagi pemerintah kalurahan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, sektor swasta, dan pemerintah daerah untuk memperluas akses pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM. Kolaborasi ini dapat menghadirkan program magang, mentoring, atau fasilitasi pelatihan dengan materi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing sektor usaha di desa. Misalnya, untuk UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, pemerintah kalurahan dapat bekerja sama dengan desainer atau pelatih yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut.

Penguatan pengetahuan dan keterampilan juga harus melibatkan pemahaman tentang inovasi produk. Pelaku UMKM perlu didorong untuk

terus berinovasi agar produk yang dihasilkan tetap memiliki daya saing. Pemerintah kalurahan dapat memberikan dukungan dengan memperkenalkan tren pasar, memfasilitasi riset dan pengembangan produk, serta memberikan akses kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran atau bazar untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

Melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik, mengoptimalkan potensi yang ada, dan menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih siap. Program-program pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga membangun mentalitas kewirausahaan yang tangguh dan inovatif. Dengan demikian, pengembangan UMKM di tingkat kalurahan akan berjalan lebih maksimal, membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, serta mendorong perekonomian desa yang lebih maju dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan ditemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Karangawen telah melakukan penguatan pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Arina Wati selaku Pelaku UMKM Sektor Makanan sebagai berikut:

"Selama ini, saya merasa Pemerintah Kalurahan sudah mencoba memberikan pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM, namun masih sangat terbatas. Beberapa waktu lalu, ada pelatihan tentang pemasaran digital, yang saya rasa sangat bermanfaat, terutama untuk memperkenalkan produk kami melalui media sosial. Tetapi, pelatihan seperti ini hanya dilakukan sesekali dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, saya berharap ada program pelatihan yang lebih rutin dan mendalam, misalnya pelatihan tentang manajemen keuangan atau teknik pemasaran yang lebih praktis. Pengetahuan yang lebih lengkap akan membantu kami mengelola usaha dengan lebih baik." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pardi sebagai Pelaku UMKM Kerajinan Tangan sebagai berikut:

"Saya menjalankan usaha kerajinan tangan, dan meskipun kami sudah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan, saya merasa masih banyak hal yang perlu kami pelajari. Misalnya, pelatihan tentang cara mengelola keuangan yang efisien dan strategi pemasaran yang lebih modern. Kami sangat membutuhkan pelatihan yang lebih spesifik dan berkelanjutan, tidak hanya teori, tapi juga praktek langsung. Sebagai pelaku UMKM, kami butuh pendampingan dalam hal mengembangkan desain produk, kualitas produksi, dan cara menjual produk kami di pasar yang lebih luas. Pemerintah Kalurahan KKarangawen diharapkan bisa memfasilitasi pelatihan dengan materi yang lebih aplikatif dan mendalam." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Tata Laksana Kalurahan Karangawen yakni Bapak Yohanes D.W. Saputra sebagai berikut:

"Pemerintah Kalurahan Karangawen telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM di sini. Kami sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan, seperti pelatihan tentang cara mengelola keuangan, pelatihan produk lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran. Namun, kami sadar bahwa pelatihan yang diberikan masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas materi maupun frekuensinya. Kami juga berharap bisa menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan atau universitas untuk memberikan pelatihan yang lebih komprehensif. Ke depan, kami berencana untuk mengadakan lebih banyak sesi pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Narasi yang sama juga disampaikan oleh Bapak Gambul sebagai Pelaku UMKM Sektor Pertanian:

"Saya menjalankan usaha pengolahan hasil pertanian dan merasa bahwa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa masih belum cukup untuk membantu kami mengembangkan usaha lebih lanjut. Misalnya, kami membutuhkan pelatihan tentang penggunaan teknologi terbaru dalam pertanian, cara mengolah produk menjadi lebih bernilai tinggi, serta cara menjual produk kami dengan harga yang lebih kompetitif. Sebelumnya, ada beberapa pelatihan tentang pemeliharaan tanaman dan teknik dasar pengolahan, namun saya rasa kami membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang aspek bisnis pertanian, seperti analisis pasar dan manajemen distribusi. Pemerintah desa seharusnya lebih fokus pada kebutuhan-



kebutuhan spesifik yang ada di masing-masing sektor UMKM.” **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sumartanti Sebagai Pelaku UMKM Toko Ritel sebagai berikut:

Untuk saya yang mengelola toko ritel, pelatihan yang pernah diberikan oleh pemerintah desa terkait pemasaran produk sangat membantu. Kami belajar tentang cara menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dagangan kami. Namun, saya berharap ada pelatihan lanjutan yang lebih terfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, seperti manajemen stok barang, pelayanan pelanggan yang lebih baik, serta pengelolaan keuangan toko yang efektif. Pemerintah desa sudah memulai langkah yang baik, tetapi lebih banyak pelatihan yang praktis dan aplikatif sangat dibutuhkan oleh kami sebagai pelaku usaha ritel.” **Wawancara, 20 Juni 2024).**

**Kesimpulan dari Wawancara:** Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kelurahan Karangawen sudah berusaha mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, banyak pelaku usaha yang merasa pelatihan yang diberikan masih terbatas dan tidak cukup untuk menunjang perkembangan usaha mereka secara maksimal. Pelaku UMKM berharap agar Pemerintah Kelurahan dapat memberikan pelatihan yang lebih spesifik, berkelanjutan, dan aplikatif, seperti pelatihan dalam hal manajemen keuangan, pemasaran digital, pengolahan produk, serta penggunaan teknologi dalam usaha. Selain itu, mereka juga menginginkan pendampingan yang lebih mendalam untuk bisa mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kedepannya, penguatan pelatihan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor UMKM akan sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha mereka.

### **C. Pemberian Akses Pembiayaan Oleh Pemerintah Kalurahan**

Pemberian akses pembiayaan oleh pemerintah kalurahan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi desa. UMKM berperan besar dalam perekonomian lokal, namun seringkali menghadapi kendala utama dalam pengembangan usaha, yaitu keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal untuk memperluas usaha, berinovasi, atau mengatasi masalah arus kas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kalurahan untuk menciptakan berbagai solusi pembiayaan yang dapat mendukung kelangsungan dan pertumbuhan UMKM di tingkat desa.

Sebagai pemerintah yang berada di garda terdepan dalam pengelolaan ekonomi lokal, kalurahan memiliki potensi besar untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui berbagai skema yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah dengan memanfaatkan dana desa untuk program pembiayaan UMKM. Pemerintah kalurahan dapat mengalokasikan sebagian dana desa untuk membantu pelaku UMKM dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah, hibah, atau fasilitas lainnya yang lebih fleksibel. Skema pembiayaan ini dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha, sehingga pelaku UMKM tidak terbebani oleh pembayaran yang tinggi dan dapat fokus mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, atau lembaga pembiayaan mikro,

untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap kredit usaha. Dengan adanya kemitraan ini, kalurahan dapat membantu memperkenalkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM, seperti kredit mikro atau kredit produktif yang memiliki persyaratan lebih mudah dan bunga yang terjangkau. Pemerintah kalurahan juga dapat mengkoordinasikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang cara mengelola pembiayaan dengan bijak agar mereka dapat memanfaatkan dana yang diberikan untuk pengembangan usaha secara optimal.

Selain pembiayaan langsung, akses pembiayaan juga dapat berupa fasilitasi UMKM dalam mengakses dana hibah atau program-program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah kalurahan dapat membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan proposal atau perizinan untuk mendapatkan dana bantuan atau hibah, serta memberikan pendampingan teknis agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan pengembangan usaha yang telah ditetapkan.

Pemberian akses pembiayaan ini juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha. Pemerintah kalurahan dapat menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan yang meliputi pencatatan keuangan, perencanaan anggaran, dan analisis arus kas. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan, pelaku UMKM akan lebih mudah dalam mengelola dana yang diterima dan mengoptimalkan pembiayaan yang telah diberikan.

Melalui pemberian akses pembiayaan yang mudah, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, pemerintah kalurahan dapat mempercepat

pertumbuhan ekonomi desa. Dengan adanya dana yang cukup, pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar. Selain itu, keberhasilan dalam pengembangan UMKM akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberian akses pembiayaan yang tepat oleh pemerintah kalurahan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan ditemukan bahwa pemerintah desa telah memberikan dukungan berupa infrastruktur kepada pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Arina Wati selaku Pelaku UMKM Sektor Makanan:

"Saya menjalankan usaha makanan rumahan yang cukup berkembang, namun masalah utama yang saya hadapi adalah keterbatasan modal. Terkait dengan akses pembiayaan dari Pemerintah Kalurahan, saya belum pernah mendapat bantuan atau pinjaman khusus untuk usaha saya. Saya mendengar tentang program bantuan atau pinjaman yang ada, namun sepertinya banyak prosedur yang harus ditempuh dan saya merasa kurang mendapat informasi tentang hal itu. Kami berharap agar pemerintah Kalurahan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai fasilitas pembiayaan yang tersedia, serta mempermudah proses pengajuan bantuan modal untuk UMKM" **Wawancara, 20 Juni 2024**).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pardi sebagai Pelaku UMKM Kerajinan Tangan ia mengatakan bahwa:

"Sejauh ini, saya belum merasakan adanya dukungan pembiayaan yang langsung diberikan oleh pemerintah desa. Saya pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan modal atau kredit usaha rakyat (KUR) melalui pemerintah desa, namun prosesnya cukup lama dan rumit. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari pinjaman melalui lembaga keuangan lain meskipun bunga yang dikenakan cukup tinggi. Saya rasa pemerintah desa perlu lebih aktif dalam memfasilitasi akses pembiayaan

untuk UMKM, mungkin dengan menjalin kerja sama dengan bank atau lembaga keuangan mikro agar prosesnya lebih cepat dan mudah." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Berkaitan dengan pembiayaan, berikut adalah hasil wawancara dengan Pemerintah Kalurahan yakni Bapak Emran Susilo, S.IP. selaku Lurah Kalurahan Karangawen. Hasil wawancanya sebagai berikut:

"Pemerintah Kalurahan Karangawen telah berupaya membantu UMKM dalam hal pembiayaan melalui beberapa program yang ada, seperti kerja sama dengan bank untuk menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman tanpa bunga untuk usaha kecil. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini karena kurangnya informasi atau pemahaman mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, karena anggaran desa terbatas, kami hanya bisa memberikan bantuan dalam skala kecil. Ke depan, kami akan berusaha lebih aktif dalam menyosialisasikan program pembiayaan ini dan mencari sumber pendanaan lain agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan akses ke pembiayaan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga di afirmasi Kembali oleh Bapak Gambul sebagai Pelaku UMKM Sektor Pertanian ia mengatakan bahwa

"Saya menjalankan usaha pengolahan hasil pertanian dan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk membeli peralatan atau bahan baku. Saya pernah mengajukan pinjaman melalui pemerintah desa, tetapi saya merasa prosesnya tidak transparan dan sangat sulit. Tidak ada pembinaan atau pendampingan yang memadai bagi kami yang ingin mengakses pembiayaan tersebut. Saya berharap pemerintah desa bisa mempermudah akses pembiayaan dengan memberikan informasi yang jelas dan menyediakan pendampingan dalam proses pengajuan agar UMKM lebih mudah mendapatkan bantuan modal yang mereka butuhkan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sumaryanti selaku Pelaku UMKM Toko Ritel menjelaskan bahwa:

"Sebagai pelaku usaha toko ritel, saya pernah mencoba mengakses bantuan pembiayaan melalui program pemerintah desa. Namun, saya merasa bahwa prosesnya terlalu berbelit-belit dan membutuhkan banyak persyaratan administratif. Program yang ada, seperti KUR, sebenarnya sangat membantu, tetapi saya merasa kurang ada dorongan dari pemerintah desa untuk memfasilitasi dan mengarahkan kami ke sana. Selain itu, saya juga berharap pemerintah desa dapat menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan yang

lebih mudah dijangkau oleh UMKM di desa kami, sehingga kami tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kalurahan Karangawen telah menyediakan akses pembiayaan melalui berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelaku UMKM masih menghadapi beberapa hambatan dalam memanfaatkan fasilitas ini. Banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena kurangnya informasi, prosedur yang rumit, dan ketidaktahuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, banyak yang menginginkan adanya pendampingan atau bimbingan dalam proses pengajuan pembiayaan. Ke depannya, penting bagi Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi yang jelas mengenai program pembiayaan yang tersedia, mempercepat proses pengajuan, serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan yang dapat mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM di Kalurahan Karangawen.

#### **D. Pelatihan UMKM**

Pelatihan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kalurahan merupakan langkah penting dalam memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa. UMKM merupakan pilar utama perekonomian desa, namun sering menghadapi kendala dalam mengelola usaha mereka, seperti keterbatasan pengetahuan tentang manajemen bisnis, pemasaran, teknologi, hingga inovasi produk. Oleh karena itu, pelatihan yang tepat dapat memberikan keterampilan dan

pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

Pemerintah kalurahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi usaha di desa. Pelatihan ini dapat meliputi berbagai bidang, antara lain manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan teknologi. Dalam hal ini, pemerintah kalurahan dapat menggandeng berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan swasta, atau ahli di bidang tertentu, untuk memberikan pelatihan yang berbasis pada kebutuhan riil pelaku UMKM.

Salah satu jenis pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM adalah pelatihan dalam manajemen keuangan. Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam mengelola arus kas, pembukuan, dan perencanaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, pelatihan ini akan membantu mereka untuk lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan yang rapi, cara mengelola modal usaha dengan efektif, serta strategi menghindari kebangkrutan akibat manajemen keuangan yang buruk.

Pelatihan pemasaran juga menjadi kunci dalam pengembangan UMKM. Pelaku UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka, baik secara lokal maupun melalui platform digital. Pemerintah kalurahan dapat mengadakan pelatihan tentang strategi pemasaran yang efektif, mulai dari pemasaran tradisional hingga pemasaran digital. Pelatihan ini juga dapat mencakup pemahaman tentang branding, penggunaan media sosial, dan platform e-commerce untuk memasarkan produk UMKM kepada pasar yang lebih luas.

Di era digital seperti sekarang, pelatihan terkait teknologi juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam operasional usaha mereka. Pemerintah kalurahan dapat memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi manajemen usaha, e-commerce, atau digital marketing. Dengan menguasai teknologi, pelaku UMKM dapat lebih efisien dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumen dengan lebih luas.

Selain pelatihan teknis, pelatihan terkait inovasi produk juga sangat penting. UMKM harus mampu berinovasi agar produk mereka tetap relevan dengan permintaan pasar dan mampu bersaing dengan produk dari luar desa. Pemerintah kalurahan dapat menyediakan pelatihan atau workshop yang mengajarkan pelaku UMKM cara menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas produk, atau memperkenalkan desain yang lebih menarik. Dengan inovasi yang tepat, UMKM dapat membuka peluang pasar baru yang lebih menguntungkan.

Pelatihan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kalurahan tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak positif bagi ekonomi desa secara keseluruhan. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, mereka akan lebih siap menghadapi persaingan pasar, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong tumbuhnya kewirausahaan baru di desa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.



Melalui pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah kalurahan dapat memainkan peran penting dalam memajukan UMKM di desanya, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pelatihan UMKM yang efektif akan memberikan bekal bagi pelaku usaha untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan berinovasi, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan ditemukan bahwa Pemerintah Kalurahan Karangawen telah memberikan dukungan berupa Anggaran kepada pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu Arina Wati selaku Pelaku UMKM Sektor Makanan sebagai berikut:

"Selama ini, saya merasa Pemerintah Kalurahan sudah mencoba memberikan pelatihan-pelatihan untuk pelaku UMKM, namun masih sangat terbatas. Beberapa waktu lalu, ada pelatihan tentang pemasaran digital, yang saya rasa sangat bermanfaat, terutama untuk memperkenalkan produk kami melalui media sosial. Tetapi, pelatihan seperti ini hanya dilakukan sesekali dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, saya berharap ada program pelatihan yang lebih rutin dan mendalam, misalnya pelatihan tentang manajemen keuangan atau teknik pemasaran yang lebih praktis. Pengetahuan yang lebih lengkap akan membantu kami mengelola usaha dengan lebih baik." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pardi sebagai Pelaku UMKM Kerajinan Tangan sebagai berikut:

"Saya menjalankan usaha kerajinan tangan, dan meskipun kami sudah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan, saya merasa masih banyak hal yang perlu kami pelajari. Misalnya, pelatihan tentang cara mengelola keuangan yang efisien dan strategi pemasaran yang lebih modern. Kami sangat membutuhkan pelatihan yang lebih spesifik dan berkelanjutan, tidak hanya teori, tapi juga praktek langsung. Sebagai pelaku UMKM, kami butuh pendampingan dalam hal mengembangkan desain produk, kualitas produksi, dan cara menjual produk kami di pasar yang lebih luas. Pemerintah Kalurahan Karangawen

diharapkan bisa memfasilitasi pelatihan dengan materi yang lebih aplikatif dan mendalam." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arif Manuji

Selaku Kamitua Kalurahan Karangawen sebagai berikut:

"Pemerintah Kalurahan Karangawen telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM di sini. Kami sudah menyelenggarakan berbagai pelatihan, seperti pelatihan tentang cara mengelola keuangan, pelatihan produk lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran. Namun, kami sadar bahwa pelatihan yang diberikan masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas materi maupun frekuensinya. Kami juga berharap bisa menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan atau universitas untuk memberikan pelatihan yang lebih komprehensif. Kedepan, kami berencana untuk mengadakan lebih banyak sesi pelatihan yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama dalam hal pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Narasi yang sama juga disampaikan oleh Bapak Gambul sebagai

Pelaku UMKM Sektor Pertanian:

"Saya menjalankan usaha pengolahan hasil pertanian dan merasa bahwa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa masih belum cukup untuk membantu kami mengembangkan usaha lebih lanjut. Misalnya, kami membutuhkan pelatihan tentang penggunaan teknologi terbaru dalam pertanian, cara mengolah produk menjadi lebih bernilai tinggi, serta cara menjual produk kami dengan harga yang lebih kompetitif. Sebelumnya, ada beberapa pelatihan tentang pemeliharaan tanaman dan teknik dasar pengolahan, namun saya rasa kami membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang aspek bisnis pertanian, seperti analisis pasar dan manajemen distribusi. Pemerintah desa seharusnya lebih fokus pada kebutuhan-kebutuhan spesifik yang ada di masing-masing sektor UMKM." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Sumaryanti Sebagai Pelaku

UMKM Toko Ritel sebagai berikut:

"Untuk saya yang mengelola toko ritel, pelatihan yang pernah diberikan oleh pemerintah desa terkait pemasaran produk sangat membantu. Kami belajar tentang cara menggunakan media sosial untuk mempromosikan barang dagangan kami. Namun, saya berharap ada pelatihan lanjutan yang lebih terfokus pada peningkatan keterampilan manajerial, seperti manajemen stok barang, pelayanan pelanggan yang lebih baik, serta pengelolaan keuangan toko yang efektif. Pemerintah desa sudah memulai langkah yang

baik, tetapi lebih banyak pelatihan yang praktis dan aplikatif sangat dibutuhkan oleh kami sebagai pelaku usaha ritel." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kalurahan Karangawen sudah berusaha mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, banyak pelaku usaha yang merasa pelatihan yang diberikan masih terbatas dan tidak cukup untuk menunjang perkembangan usaha mereka secara maksimal. Pelaku UMKM berharap agar Pemerintah Kalurahan dapat memberikan pelatihan yang lebih spesifik, berkelanjutan, dan aplikatif, seperti pelatihan dalam hal manajemen keuangan, pemasaran digital, pengolahan produk, serta penggunaan teknologi dalam usaha. Selain itu, mereka juga menginginkan pendampingan yang lebih mendalam untuk bisa mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kedepannya, penguatan pelatihan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan sektor- sektor UMKM akan sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha mereka.

#### **E. Penguatan Fasilitas dan Infrastruktur**

Penguatan fasilitas dan infrastruktur oleh pemerintah kalurahan merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa. UMKM memegang peran vital dalam perekonomian desa, namun seringkali terbatas oleh infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan yang buruk, keterbatasan fasilitas produksi, serta kurangnya sarana pendukung usaha.

Oleh karena itu, penguatan fasilitas dan infrastruktur yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional UMKM, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal.

Salah satu bentuk penguatan fasilitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah kalurahan adalah dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan desa, penerangan umum, dan jaringan komunikasi yang memadai. Akses jalan yang baik akan memudahkan distribusi barang dan bahan baku, sehingga pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih lancar dan mengurangi biaya transportasi yang tinggi. Selain itu, infrastruktur komunikasi yang baik, seperti penyediaan internet dan jaringan telekomunikasi yang stabil, akan membantu pelaku UMKM untuk mengakses pasar digital dan meningkatkan kemampuan mereka dalam memasarkan produk secara *online*.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah kalurahan juga dapat memperkuat fasilitas produksi yang mendukung kegiatan UMKM. Misalnya, dengan menyediakan ruang usaha bersama (*co-working space*) atau pusat produksi bersama (*shared facilities*) yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk berproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Fasilitas seperti ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki modal untuk membangun atau menyewa tempat produksi sendiri. Dengan adanya fasilitas bersama, pelaku UMKM dapat mengurangi biaya operasional dan memaksimalkan produksi.

Pemerintah kalurahan juga dapat mendukung penguatan fasilitas di bidang teknologi dan inovasi. Di era digital, penggunaan teknologi sangat

penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM. Oleh karena itu, kalurahan dapat menyediakan fasilitas teknologi, seperti pelatihan digital marketing, pemanfaatan platform e-commerce, dan alat teknologi untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk. Penyediaan fasilitas seperti komputer, internet cepat, atau alat produksi berbasis teknologi akan membantu UMKM untuk lebih berkembang dan mengikuti perkembangan tren pasar.

Selain itu, penguatan fasilitas dan infrastruktur juga mencakup penyediaan fasilitas untuk pemasaran produk. Pemerintah kalurahan dapat membangun pusat pemasaran atau pasar rakyat yang modern, di mana produk UMKM dapat dipamerkan dan dijual dengan lebih mudah. Dengan adanya fasilitas pemasaran yang memadai, pelaku UMKM akan lebih mudah menjangkau konsumen, baik dari dalam maupun luar desa. Pasar rakyat ini juga dapat menjadi tempat promosi bagi produk-produk khas lokal yang memiliki potensi untuk berkembang.

Penting juga bagi pemerintah kalurahan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pembiayaan dan akses ke pasar, seperti penyediaan informasi terkait berbagai program pembiayaan dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan adanya informasi yang jelas dan akses yang mudah, pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk mengembangkan usaha mereka, baik melalui dana hibah, pinjaman, atau program pendampingan usaha.

Dengan penguatan fasilitas dan infrastruktur yang terencana dan tepat sasaran, pemerintah kalurahan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif

bagi pengembangan UMKM. Infrastruktur yang baik akan mempercepat proses distribusi, sementara fasilitas pendukung lainnya akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelaku UMKM dalam memproduksi dan memasarkan produk mereka. Sebagai hasilnya, penguatan fasilitas dan infrastruktur tidak hanya membantu UMKM berkembang, tetapi juga mendorong perekonomian desa menjadi lebih dinamis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan fasilitas dan infrastruktur oleh pemerintah kalurahan untuk pengembangan UMKM adalah langkah strategis yang sangat penting. Melalui peningkatan aksesibilitas, teknologi, serta fasilitas produksi dan pemasaran yang memadai, pelaku UMKM akan lebih siap bersaing, berinovasi, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian lokal. Inilah yang akan menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif.

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan ditemukan bahwa pemerintah desa telah memberikan dukungan berupa infrastruktur kepada pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes, D.W. Saputra selaku Tata Laksana Kalurahan Karangawen. Beliau mengatakan bahwa:

"Kami dari Pemerintah Kalurahan Karangawen memang menyadari pentingnya infrastruktur untuk mendukung UMKM di desa kami. Namun, anggaran yang ada saat ini masih terbatas, dan sebagian besar dana dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti pemeliharaan jalan desa dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Untuk mendukung UMKM, kami telah berupaya menyediakan beberapa fasilitas, seperti akses jalan yang lebih baik dan tempat pertemuan yang bisa digunakan untuk pelatihan atau kegiatan promosi UMKM. Namun, memang masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperbanyak. Ke depannya, kami berharap dapat bekerjasama dengan dinas terkait atau lembaga keuangan untuk mencari sumber dana tambahan yang

dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur bagi UMKM." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Arina Wati selaku Pelaku UMKM Sektor Makanan sebagai berikut:

"Saya menjalankan usaha kecil di bidang makanan olahan, dan meskipun sudah beberapa tahun berjalan, saya merasa kurang mendapat dukungan dari pemerintah desa, terutama dalam hal infrastruktur. Memang, desa sudah menyediakan beberapa fasilitas seperti pasar desa yang cukup dekat dengan tempat usaha saya. Namun, pasar tersebut belum cukup memadai untuk meningkatkan jumlah pengunjung, dan fasilitas seperti tempat penyimpanan produk yang memadai juga belum ada. Saya berharap pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas seperti tempat penyimpanan atau ruang pameran yang bisa digunakan oleh UMKM untuk memasarkan produk mereka lebih luas." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Berikut adalah hasil wawan cara dengan Bapak Pardi sebagai Pelaku UMKM Kerajinan Tangan sebagai berikut:

"Untuk usaha kerajinan tangan yang saya jalankan, dukungan infrastruktur dari Pemerintah Klaurahan Karangawen terbilang cukup terbatas. Pemerintah Kalurahan memang telah menyediakan beberapa fasilitas, seperti jalan yang cukup baik menuju lokasi usaha saya. Namun, yang kami butuhkan adalah fasilitas pelatihan dan ruang untuk pameran produk yang lebih besar. Sekarang, tempat pameran masih terbatas di balai Kalurahan, yang sering kali tidak cukup untuk menampung banyak produk. Harapan saya, pemerintah Kalurahan dapat membangun fasilitas atau gedung serba guna yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan UMKM, termasuk untuk kegiatan promosi produk." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Gambu Pelaku UMKM Sektor Pertanian mengatakan bahwa:

"Sebagai pelaku usaha pertanian yang juga mengolah hasil pertanian, infrastruktur yang tersedia di desa kami sudah cukup memadai. Pemerintah desa telah membantu dengan pembangunan akses jalan yang lebih baik menuju kebun dan area pertanian. Namun, kami masih membutuhkan fasilitas seperti penyimpanan hasil panen yang lebih modern dan lebih banyak tempat untuk mengolah produk kami sebelum dipasarkan. Infrastruktur yang ada saat ini, meskipun cukup membantu, masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung perkembangan usaha kami, terutama dalam hal distribusi dan pengemasan." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Berkaitan dengan infrastruktur penunjang UMKM hal yang sama juga diafirmas Kembali oleh Ibu Sumaryanti sebagai pelaku Pelaku UMKM Toko Ritel ia mengatakan bahwa:

"Saya menjalankan toko ritel di desa ini, dan salah satu dukungan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah desa adalah pembangunan pasar yang lebih modern. Walaupun demikian, saya merasa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti penerangan dan kebersihan area pasar yang belum optimal. Selain itu, akses ke pasar juga masih terbatas karena beberapa jalan utama belum sepenuhnya diperbaiki. Ke depan, kami berharap ada upaya lebih dari pemerintah desa untuk membangun infrastruktur yang mendukung distribusi barang, serta memperbaiki fasilitas umum yang bisa memudahkan kami dalam menjalankan usaha." **Wawancara, 20 Juni 2024).**

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Kalurahan Karangawen telah memberikan beberapa dukungan infrastruktur kepada UMKM, terutama dalam hal akses jalan dan tempat pertemuan, namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa UMKM berharap Pemerintah Kalurahan Karangawen dapat meningkatkan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan produk, ruang pamer, serta pembangunan infrastruktur yang lebih memadai untuk distribusi dan pemasaran. Selain itu, UMKM juga membutuhkan fasilitas pelatihan yang lebih lengkap untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha mereka. Ke depannya, pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur UMKM dan kerjasama dengan lembaga lain diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan ini.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, peran Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat kalurahan masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan upaya yang dilakukan belum optimal. Meskipun telah ada kebijakan dan berbagai program untuk mendukung pengembangan UMKM, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku UMKM.

Beberapa faktor yang menyebabkan pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen belum optimal antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di kalurahan, serta masih terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan UMKM. Program-program pelatihan, pemberian akses pembiayaan, dan penguatan fasilitas yang telah dilakukan sering kali belum menyentuh seluruh pelaku UMKM di kalurahan secara merata. Selain itu, tantangan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kalurahan juga dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif.

Namun, meskipun tantangan tersebut ada, masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas aparatur kalurahan, peningkatan alokasi anggaran untuk UMKM, serta pengembangan infrastruktur yang lebih mendukung kebutuhan pelaku usaha di Kalurahan

menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan fokus pada pengembangan masyarakat secara langsung, Pemerintah Kalurahan Karangawen dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, meskipun upaya Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam pengembangan UMKM sudah ada, masih perlu banyak peningkatan dalam berbagai aspek untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang ada benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen.

## **B. Saran**

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil, antara lain:

### **1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalurahan**

Pemerintah kalurahan perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program-program UMKM. Pelatihan bagi aparatur kalurahan mengenai manajemen usaha, pengelolaan anggaran, serta penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya UMKM dapat memperkuat implementasi kebijakan yang ada. Dengan demikian, pemerintah kalurahan dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan dan pendampingan yang diperlukan oleh pelaku UMKM.

## **2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dan Anggaran Khusus UMKM**

Pemerintah kalurahan harus memastikan alokasi dana desa atau anggaran khusus untuk UMKM digunakan secara maksimal. Salah satu caranya adalah dengan menyusun program-program yang tepat sasaran dan fokus pada kebutuhan pelaku UMKM, seperti penyediaan modal kerja, fasilitas produksi, dan pelatihan keterampilan. Pengelolaan dana yang transparan dan efisien akan memberikan dampak yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

## **3. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan**

Untuk mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi oleh UMKM, pemerintah kalurahan perlu menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, seperti bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan mikro. Program pembiayaan yang mudah diakses, seperti pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah, serta pemberian hibah, dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu, kalurahan juga perlu memfasilitasi pelatihan tentang pengelolaan keuangan agar pelaku UMKM dapat mengelola pembiayaan dengan bijak.

## **4. Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung UMKM**

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, akses internet, dan fasilitas produksi, sangat penting untuk mendukung kelancaran usaha UMKM. Pemerintah kalurahan perlu memperhatikan pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang bisa mendukung

operasional UMKM, seperti menyediakan tempat usaha bersama atau pusat distribusi produk lokal. Infrastruktur digital yang mendukung pemasaran online juga menjadi kunci bagi UMKM agar dapat mengakses pasar yang lebih luas.

#### **5. Pengembangan Program Pelatihan yang Berkelanjutan**

Pelatihan yang terfokus dan berkelanjutan perlu diberikan kepada pelaku UMKM. Selain pelatihan manajemen usaha dan pemasaran, pelatihan teknologi digital dan inovasi produk juga sangat diperlukan. Pemerintah kalurahan harus memastikan bahwa pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha di desa serta terus disesuaikan dengan perkembangan pasar dan teknologi.

#### **6. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pihak Lain**

Pemerintah kalurahan perlu membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah dan pusat. Kolaborasi ini bisa mencakup penyelenggaraan pelatihan bersama, pemberian akses pasar, hingga pendampingan dalam pengelolaan usaha. Sinergi antara berbagai pihak akan memperluas peluang bagi pelaku UMKM untuk berkembang lebih cepat.

#### **7. Pembuatan Kebijakan yang Responsif dan Inklusif**

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan perlu lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pemerintah kalurahan harus aktif dalam memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kebijakan yang inklusif, yang

memperhatikan semua sektor usaha, akan memberikan ruang bagi berbagai jenis UMKM untuk berkembang.

#### **8. Fasilitasi Akses Pasar untuk Produk UMKM**

Pemerintah kalurahan dapat memfasilitasi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar melalui pameran, bazar, atau platform e-commerce. Program promosi yang lebih terarah, seperti pemasaran produk melalui media sosial atau website desa, dapat membantu produk UMKM dikenal lebih luas. Selain itu, kerja sama dengan pihak ketiga, seperti retailer atau distributor, dapat membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldida, B., & Santosa, P. B. (2013). Analisis Produksi dan Efisiensi Industri Kecil Menengah Batik di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(1):10-20.
- Anam, K. (2019). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Di Kabupaten Jepara . *Jurnal Administrasi Publik* , 1(2):10-20.
- Andika, M. A., & Sukraaliwan, I. N. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. *Locus Majala Ilmiah* , 12(2):102-110.
- Andini, R. M., Amin, & Dyastari, L. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tenggara Kabupaten Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 5(4):1571-1582.
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., Alimah, M., & Malang, U. M. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5354>
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1):1286-1295.
- Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* , 2(2):479-494.
- Firmansyah, R., Pratiwi, R. N., & Riyanto. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Madiun. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1):154-160.
- Haliwangka, Razak, M., & Sjarlis, S. (2023). Peran Pemerintah Kelurahan Pada Sektor Pelayanan Kesehatan, Sektor Pengembangan UMKM Serta Sektor Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mallusetasi Kota Pare-Pare. *Jurnal Pusaran Manajemen*, 2(1):102-116.
- Hartati, W., & Hendratmoko, C. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pengembangan UMKM. *Indonesian Journal Of Strategic Management*, 4(1):2614-2406.
- Hutami, A. A. (2016). Strategi Pengembangan UMKM Pedesaan Menuju Entrepreneurs Village Pada Pasar Global. *Jurnal Manajemen*, 5(2):10-20.
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 7(1):73-86.
- Mahalizikri, I. F. (2019). Membangun Dan Mengembangkan Serta Meningkatkan UMKM Di Desa Tenggayun. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 185–194. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.171>

- Maharani, A., & Nuriukman, A. D. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media dan E-Commerce di Kota Tangerang. *Sebatik*, 27(1):333-343.
- Nirwana, D. C., Muhhamdiah, & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1):1-14.
- Nur Sudati Sarfia, Eka Hanung Atmaja, M. D. V. (2019). UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 137–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Putra, A. H. (2016). Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52. <https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162>
- Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(1):102-114.
- Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kebijakan (S.Y. Ratri (ed.);ke-1 Alvabeta CV Diakses 09/11/2024
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widayanti, R., Damayanti, R., & Marwanti, F. (2017). Pengaruh Financial Literacy Terhadap Keberlangsungan Usaha (Business Sustainability) Pada Umkm Desa Jatisari. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 18(2), 153–163. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i2.1399>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan:**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Berapa jumlah UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen?
2. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan pemerintah Kalurahan Karangawen untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM yang ada. Tunjukkan implementasi kebijakan tersebut!
3. Mengapa perlu dilakukan pemberdayaan UMKM di Kalurahan Karangawen?
4. Bagaimana dengan dukungan anggran dalam APBKal untuk memberdayakan UMKM?
5. Jelaskan strategi apa yang digunakan pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mengembangkan UMKM yang ada?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kalurahan Karangawen untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung program UMKM



7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung program UMKM?
8. Bagaimana UMKM dalam meningkatkan pendapatan asli Desa?
9. Bagaimana transparansi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mengembangkan UMKM yang ada?
10. Bagaimana penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mengembangkan UMKM yang ada?
11. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintahan Kalurahan Karangawen terhadap pengembangan UMKM?
12. Bagaimana dampak penerapan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban mampu meningkatkan pengembangan UMKM yang ada di Kalurahan Karangawen? Jelaskan!

## LAMPIRAN



**Foto Bersama Pak Erman Susilo, S.IP Lurah Kalurahan Karangawen**



**Foto Bersama Yohanes D. W. Saputra Sebagai Tata Laksana  
Kalurahan Karangawen**



**Foto Bersama Pak Arif Manuji, S.Pd. Selaku Kamitua Kalurahan Karangawen.**





**Foto Bersama Pak Pardi, Pelaku UMKM Sektor Kerajinan Tangan**





**Foto Bersama Pak Gambul, Pelaku UMKM Sektor Pertanian**





**Foto Bersama Ibu Arina Wati, Pelaku UMKM Sektor Makanan**



**Foto Bersama Ibu Sumaryanti, Pelaku UMKM Toko Ritel**